DAMPAK EKONOMI DAN EVALUASI BELANJA DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BATANGHARI (*Studi Kasus : Sektor Pendidikan*)

Jasasila[1]

Abstract

The concept of decentralization of education in basic education are being prepared by the Education Ministry is to provide a broad autonomy in school institutions in the concept of school-based management (SBM). With the MBS school empowerment can be optimally oriented to the four aspects, namely to: improve the quality of education, equity, relevance, and efficiency of education providers. Structurally include: political commitment and policies of the central government (MONE) which is makro.Sedangkan formulation of the problem is: The extent to which the implementation of the program is reason to twelve (12) years in the District of Batang? How the Economic Impact of the development and evaluation of regional expenditure in the education sector development Against Batang District. To analyze the use of secondary data. Furthermore, the data is processed and analyzed descriptively. The first problem formulation will be answered by comparing the components of SPM both elementary school (SD) and high school (SMP) and High School (SMA), which is divided into a number of indicators of achievement of the minimum standards have to be met. The standard is based on the attainment of a minimum percentage, presence or absence of indicators and the increase or decrease in the indicator. Furthermore, achievement of the object studied empirically may be smaller or larger than the Minimum Service Standards (MSS) are determined. As for analyzing economic growth education sector used the model as follows:

$$\text{Economic Growth (GDP)} = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_t} \times 100\%$$

The results of the above analysis shows that the contribution of 60% of local government is still happening Gap between the expenses and the cost of education that should be spent both for elementary and junior high school. The dependence of the cost of education is still expecting central contribution that minimum service standards can be achieved. With economic growth (GDP) 21.66% expected a significant economic impact on the development of the education sector in the district of Batanghari.

Keyword : economic impact, evaluation, development

PENDAHULUAN

Konsep desentralisasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang tengah disiapkan oleh Depdiknas adalah dengan cara memberikan otonomi yang luas pada institusi sekolah dalam konsep manajemen berbasis sekolah (MBS). Dengan MBS maka pemberdayaan sekolah dapat dilakukan secara lebih optimal yang berorientasi pada empat aspek yaitu untuk : *meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan, relevansi, dan efisiensi penyelenggara pendidikan*. Secara struktural mencakup : komitmen politik dan kebijakan pemerintah pusat (Depdiknas) yang bersifat makro. Dalam hal ini pemerintah pusat tidak boleh ragu-ragu dengan sikap setengah hati untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan. Hal itu haruslah tercermin pada kebijakan di bidang pendidikan yang meliputi penyiapan landasan hukum berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan menteri serta penyediaan anggaran yang memadai. Dalam lingkup struktural juga mencakup peran pemerintah daerah antara lain meliputi penataan kelembagaan institusi pendidikan dalam organisasi pemerintah daerah, peraturan pemerintah daerah, kemampuan pemerintah daerah dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat daerah yang berkaitan dengan substansi kurikulum pendidikan, dan kemampuan keuangan daerah. Dalam lingkup non struktural mencakup tersedianya anggaran sekolah, sarana prasarana sekolah, kelembagaan sekolah, manajemen kepala sekolah, SDM sekolah, partisipasi orangtua siswa dan masyarakat, proses belajar mengajar, dan kultur masyarakat lokal.

Pada saat ini disadari bahwa sektor pendidikan merupakan sektor yang berperan besar dalam pembangunan ekonomi suatu negara termasuk Indonesia. Hal tersebut teridentifikasi dar berbagai studi menunjukkan adanya hubungan positif antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia. Sebagai wujud kepedulian terhadap sektor ini, maka pemerintah meluncurkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem

[1] Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Graha Karya Muara Bulian

Pendidikan Nasional. Salah satu pasal menyebutkan tentang aspek alokasi *budgeting* dalam sektor pendidikan.yang menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan harus dialokasikan minimal 20 % dari APBN dan APBD.

Sejalan dengan itu maka akan dikaji Dampak Sosial Ekonomi Dan Evaluasi Belanja Daerah Terhadap Proyek Pembangunan Di Kabupaten Batanghari (*Studi Kasus Sektor Pendidikan*)

Pada saat ini pemerintah Kabupaten Batanghari telah mencanangkan wajib belajar (WAJAR) 12 (dua belas) tahun bagi seluruh warga masyarakat Batanghari. Dengan kata lain warga masyarakat harus bisa lulus tidak hanya dari Sekolah dasar 6 (enam) tahun juga harus lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 tahun dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 tahun.

Mengacu kepada Pemerintah pusat yang sudah melakukan WAJAR 9 tahun serta melalui Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengeluarkan pedoman pelaksanan proses belajar mengajar (PBM) dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Dari uraian diatas didapat rumusan masalah sebagai berikut :

1) Sejauh mana pelaksanaan program Wajar 12 (dua belas) tahun di Kabupaten Batanghari ?
2) Bagaimana Dampak Ekonomi terhadap pembangunan dan Evaluasi Belanja Daerah Terhadap Pembangunan sektor Pendidikan di Kabupaten Batanghari

Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan diatas maka tujuan penelitian adadalah sebagai berikut: 1) Untuk Mengidentifikasi pelaksanaan program WAJAR 12 tahun di Kabupaten Batanghari. 2) Untuk melihat dampak ekonomi dan evaluasi belanja daerah terhadap pembangunan di Kabupaten Batanghari (*Studi Kasus Sektor Pendidikan*)

Model Analisis

Untuk menganalisis digunakan data sekunder. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif. Rumusan masalah pertama akan dijawab dengan cara membandingkan komponen SPM baik sekolah dasar (SD) dan sekolah lanjutan pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) yang terbagi menjadi beberapa indikator mempunyai standar ketercapaian minimal yang harus dipenuhi. Standar ketercapaian minimal ini didasarkan atas persentase, ada tidaknya indikator serta terjadinya peningkatan maupun penurunan indikator. Lebih lanjut, ketercapaian dari obyek yang diteliti secara empiris dapat lebih kecil maupun lebih besar dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditentukan.

Dari hasil perhitungan ketercapaian minimal komponen SPM sesuai dengan indikator yang ada kemudian ditabulasikan berdasarkan jumlah sampel yang digunakan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka diperoleh jumlah sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan pertama (SMP) Sekolah Menengah Atas (SMA) yang sederajat yang memenuhi ketercapaian minimal maupun yang belum memenuhi. Hasil perhitungan ini akan diketahui terjadinya *gap* positif atau negatif dari indikator yang telah ditentukan.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut diatas maka tahap pertama adalah menghitung biaya operasional program wajar pendidikan dasar 12 tahun tahun yang berbasis kurikulum per siswa maupun per lembaga. Cara perhitungannya dengan menentukan fungsi biaya operasional per siswa untuk tingkat SD maupun SLTP & SLTA yang diformulasikan sebagai berikut:

$$c_i = f(I_i)\varepsilon \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

Di mana, c_i adalah biaya operasional per siswa setiap sekolah *i* yang dinyatakan dalam satuan rupiah dan I_i adalah indeks pendidikan setiap sekolah *i*. Biaya operasional diperoleh dari data primer masing-masing sekolah *i*.

c_i merupakan biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing sekolah *i* selama satu tahun (C_i) dibagi dengan jumlah murid masing-masing sekolah (N). Dengan demikian, formula biaya operasional per siswa adalah:

$$c_i = \frac{C_i}{N} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (2)$$

Indeks pendidikan masing masing sekolah (I_i) diperoleh berdasarkan indikator keberhasilan setiap sekolah dalam melaksanakan kurikulum nasional maupun kurikulum lokal. Indikator-indikator yang dihitung dalam penelitian ini disesuaikan dengan indikator yang ada di dalam Kep.Mendiknas tersebut diatas dengan mengeluarkan indikator-indikator yang tidak mempunyai besaran dengan skala interval. Kriteria penentuan nilai maksimal I_i adalah 100.

Dengan mengacu ketentuan tersebut diatas maka indeks pendidikan berdasarkan SPM *(I_{SPM})* dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$I_{SPM} = \frac{\Sigma I_{SPMi}}{\Sigma I} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(3)$$

Di mana:

I_{SPM} = Indeks pendidikan SPM berdasarkan kentetuan;

ΣI_{SPMi} = Jumlah masing masing nilai indikator ketercapaian minimal berdasarkan ketentuan;

ΣI = Jumlah indikator dalam ketentuan.

Catatan:

Bila indikator dalam ketentuan tidak mempunyai besaran dengan skala interval maka dikeluarkan dari perhitungan Dengan melakukan regresi variabel c_i dengan I_i maka akan diperoleh fungsi biaya operasional per siswa $c_i = f(I_i)$. Dengan memasukkan nilai I_{SPM} ke dalam fungsi biaya tersebut maka akan diperoleh biaya operasional per siswa sesuai dengan ketentuan SPM *(c_{SPM})*.

Dari beberapa fungsi biaya tersebut akan dipilih satu fungsi biaya pendidikan operasional per siswa yang dianggap paling tepat dengan menggunakan beberapa pertimbangan statistik (*t test, white test* dan *Ramsey's RESET test*) maupun non-statistik.

Perhitungan biaya operasional per lembaga. Untuk menghitung biaya operasional per lembaga perlu diketahui rata-rata jumlah siswa di setiap sekolah. Rata-rata jumlah siswa di setiap sekolah dapat diperoleh dengan persamaan berikut:

$$\overline{Sw} = \frac{\Sigma sw}{\Sigma sk} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots(4)$$

Di mana:

Σ sw = jumlah siswa di Kabupaten Batanghari

Σsk = jumlah sekolah di Kabupaten Batanghari

Dengan mengetahui biaya operasional per siswa sesuai dengan ketentuan SPM (c_{SPM}) dan rata-rata jumlah siswa di setiap sekolah maka akan dapat ditentukan biaya operasional per lembaga sesuai dengan ketentuan SPM *(c_{LBG})*. Adapun caranya sebagai berikut:

$$C_{LBG} = C_{SPM}.\overline{SW}$$

Sedangkan untuk menganalisis Pertumbuhan Ekonomi sektor pendidikan digunakan model sebagai berikut **:**

$$\text{Pertumbuhan ekonomi (PDRB)} = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_t} \times 100\%$$

Dalam menganalisis dampak belanja pemerintah terhadap pencapaian kinerja sektor pendidikan di Batanghari model analisis yang digunakan direfleksikan dalam bentuk hubungan matematis sebagai berikut:

$Y_i = f(X_i, Z_i)$

dimana: Y adalah indikator sosial yang menunjukkan kinerja sektor pendidikan dan kesehatan di kabupaten/kota i sebagai fungsi dari rasio pengeluaran pembangunan untuk sektor pendidikan dan kesehatan dengan PDRB (X_i), dan vektor variabel sosial ekonomi (Z_i) yang diperlakukan sebagai variabel kontrol. Berdasarkan hubungan matematis tersebut, model untuk bidang pendidikan dan kesehatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Model Pendidikan

$$GER_i = \beta_0 + \beta_1 (EDU/PDRB)_i + \beta_2 Y_Kap_i + \beta_3 AMH_i + \beta_4 AKB + \varepsilon_i$$

dimana:

GER	=	kinerja sektor pendidikan yang dalam model ini menggunakan angka partisipasi sekolah (APS).
EDU/PDRB	=	rasio pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan terhadap Produk Domestik regional Bruto. Semakin besar rasio tersebut diharapkan akan meningkatkan kinerja sektor pendidikan.
Y_Kap	=	pendapatan per kapita. Semakin tinggi tingkat pendapatan rumah tangga biaya menyekolahkan anak menjadi relatif murah. Lebih lanjut, dengan asumsi bahwa pendidikan adalah barang normal, maka pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi, permintaan terhadap pendidikan akan meningkat.

AMH	=	angka melek huruf. Penggunaan variabel ini didasarkan pada kenyataan bahwa orang tua yang terdidik (baca: dapat membaca & menulis) biasanya mempunyai motivasi yang tinggi untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dengan demikian variabel ini diharapkan berdampak positip kinerja pendidikan.
AKB	=	angka kematian bayi. Jumlah penduduk usia sekolah menurun dengan semakin tingginya angka kematian bayi. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat kematian bayi diharapkan berkorelasi negatip dengan kinerja pendidikan.
$\beta_0, \beta_1, \ldots \beta_4$	=	koefisien regresi
ε	=	kesalahan penganggu (*error term*)
i	=	Wlayah (Kecamatan)

Data Jumlah Siswa, Biaya Pendidikan & Jumlah Sekolah Untuk Jenjang Sekolah Dasar

NO	KECAMATAN	JUMLAH SISWA (I)	BIAYA PENDIDIKAN (Rp) (C_i)	JUMLAH SEKOLAH	BIAYA PER SISWA (c_i)
1.	Muara Tembesi	3.417	1.165.141,48	24	Rp 340,98
2.	Mersam	3.357	810.092,67	23	Rp 241,31
3.	Muara Bulian	6.020	957.035,69	36	Rp 158,98
4.	Batin XXIV	3.233	1.076.758,42	26	Rp 333,05
5.	Pemayung	3.459	1.071.360,89	27	Rp 309,73
6.	Marosebo Ulu	4.346	491.348,37	20	Rp 113,06
7.	Marosebo Ilir	1.891	367.408,84	10	Rp 194,29
8.	Bajubang	3.157	1.467.718,10	25	Rp 464,91
Jumlah Total…….		**28.880**	**7.406.864,46**	**191**	Rp **2.096,83**

Sumber : Profil Pendidikan tahun 2013

Dalam penentuan daerah sampel sebaiknya berdasarkan atas pendekatan indeks pendidikan dan indeks harapan hidup masing-masing Kecamatan yang ada diKabupaten Batanghari dengan kriteria: 1) Tinggi, 2) sedang, dan 3) rendah. Di samping menggunakan pendekatan tersebut juga memperhatikan aspek penyebaran daerah sehingga diharapkan dapat mewakili karakteristik semua daerah di Kabupaten Batanghari. Masing-masing kelompok diambil 2 daerah sampel.

Sebagai *ilustri contoh kasus* dalam melihat Dampak Ekonomi dan Evaluasi Belanja Daerah Terhadap Pembangunan (sektor pendidikan) diperkirakan Jumlah sampel untuk semua tingkatan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs) sebanyak 600 sekolah baik negeri maupun swasta.

Sedangkan data untuk PDRB* kabupaten Batanghari adalah sebagai berikut :

$PDRB_t$ = Rp. 135.940.000,-

$PDRB_{t-1}$ = Rp. 106.500.00,-

PEMBAHASAN

Dari contoh kasus dan data rekayasa data (analisis dilakukan hanya kepada SD dan SMP) diatas didapat hasil analisis sebagai berikut :

Pertama, Indeks pendidikan SD diperoleh sebesar 82 dan indeks untuk mencapai SPM sebesar 92. Sedangkan biaya operasional pendidikan SD per siswa per tahun di Batanghari adalah Rp. 38.800, dengan kontribusi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat masing-masing sebesar Rp 1.164,- (30%), Rp 2.328,- (60%), dan Rp 388,- (10%). Sedangkan yang dibutuhkan untuk mencapai indeks pendidikan SD berdasarkan SPM adalah Rp. 157.815,01. Dengan demikian gap biaya antara biaya operasional *yang harus dikeluarkan* dengan biaya operasional untuk mencapai SPM sebesar Rp 56.028,-.

Kedua, Dengan asumsi beban/ partisipasi masyarakat tetap, beban kekurangan pembiayaan yang ditanggung pemerintah pusat sebesar 90% dan pemerintah daerah menanggung sebesar 10% maka total biaya operasional per siswa per tahun maka biaya yang ditanggung pemerintah pusat sebesar Rp 80.389,-, pemerintah daerah sebesar Rp 40.696,- dan masyarakat sebesar Rp 36.731,- dengan kontribusi masing-masing sebesar 50,94%, 25,79%, dan 23,37%.

Ketiga, Dengan asumsi kontribusi masing-masing pihak sebesar 60% untuk pemerintah pusat, 25% pemerintah daerah, dan 15% partisipasi masyarakat. (mengacu pada Renstra Ditjen Pendidikan Dasar dan

Menengah Depdiknas) maka distribusi beban pembiayaan untuk mencapai SPM masing-masing sebesar Rp 94.689,- (pemerintah pusat), Rp 39.454,- (pemerintah daerah), dan Rp 23.672,- (partisipasi masyarakat).

Keempat, Kebutuhan biaya per siswa per tahun SMP untuk mencapai indeks pendidikan berdasarkan SPM adalah Rp. 272.823,57. Kekurangan pembiayaan dibebankan kepada pemerintah pusat dan daerah dengan proporsi masing-masing 90% dan 10% (skenario-1). Alternatifnya, total pembiayaan untuk mencapai SPM didistribusikan menggunakan proporsi 60% pemerintah pusat, 25% pemerintah daerah dan 15% partisipasi masyarakat (skenario-2).

Kelima, Dengan rata-rata jumlah murid SMP sebanyak 504, maka biaya rata-rata per siswa per tahun (sebesar Rp 230.360,-. Sedangkan biaya rata-rata per siswa per tahun untuk mencapai SPM masing-masing adalah Rp 1.109.072,- (dengan asumsi termasuk item gaji) dan Rp 248.894,- (tanpa item gaji).

Keenam, dilihat dari data PDRB maka diperoleh pertumbuhan ekonomi tahun 2006 dan 2007 terjadi pertumbuhan sebanyak 21,66 %

KESIMPULAN

1. Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa dengan kontribusi 60 % dari Pemkab masih terjadi Gap antara biaya yang sudah dikeluarkan dengan biaya pendidikan yang seharusnya dikeluarkan baik untuk SD maupun SMP
2. Ketergantungan biaya pendidikan masih mengharapkan kontribusi pusat sehingga Standar pelayanan Minimal dapat tercapai.
3. Dengan pertumbuhan Ekonomi (PDRB) 21,66 % diharapkan memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap pembangunan sektor pendidikan di *Kabupaten Batanghari*

Saran

Untuk mengurangi gap biaya pendidikan kontribusi semua pihak terutama masyarakat sangat diharapkan dalam proses pembangunan pendidikan, dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan sektor pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, *PDRB Batanghari menurut lapangan usaha*, 2008 – 2013, Batanghari.

Dinas Pendidikan & Kebudayaan, *Profil Pendidikan Kabupaten Batanghari,* 2012, Batanghari

Budiono. 2002, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Asas Desentralisasi Fiskal, *Makalah Rakor Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Nasional Tahun 2002*, Jakarta.

Davey, Kenneth. 1989. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah di Indonesia*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.

Departemen Keuangan, *Nota Keuangan RI Tahun 2000 - 2002*, Jakarta

Hanushek, Eric. 1995, *Interpreting Recent Research on Schooling in Developing Countries*, World Bank.

Jhinghan, M.L. 1993, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan,* terjemahan. Rajawali Press, Jakarta.

Mardiasmo. 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta.

SMERU. 2004, *Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelola Pelayanan Pendidikan Dasar,* Lembaga Penelitian SMERU, Jalarta.

Suparmoko. 2000, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek,* BPFE UGM,Yogyakarta.